

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

Nurul Sukma Handayani ¹

¹ Jurusan Akuntansi Pemerintahan, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah
Grogot No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia.
E-mail: nurul_saputra05@yahoo.com, Telp: +628115555305

ABSTRACT

Nurul Sukma Handayani, 2018, "Analysis of Financial Performance of Regency and City Government in East Kalimantan" under the guidance of Mrs. Dwi Risma, and Mr. Muhammad Abadan. The Performance of Local Government in finance managing was reflected from Expenditure Local Estimate (APBD), which represented of Performance Local Government defraying the implementation of development task, an equitable balance by potency developing of each region. The matter of formulation in this research is "How The Performance Financial in East and East Kalimantan districts 2015 and 2016, when measured by Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Ratio of Harmony". Aim this research is to know Performance Financial in Financial Performance of the Regions in East and East Kalimantan districts of 2015 and 2016 when measured by Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Ratio of Harmony. The result this research explained that (1) The level of financial independence of 7 districts and 3 cities in 2015 and 2016 has a very low average (2) The financial effectiveness of 7 districts and 3 cities by 2015 and 2016 has a very effective average (3) Financial efficiency levels of 7 districts and 3 cities in 2015 and 2016 have on average less efficient (4) The level of harmonization of routine expenditures and expenditures The development of 7 districts and 3 cities by 2015 and 2016 has averaged Routine Expenditures more priority than Development Expenditures.

Keywords: *Performance Finance, Independent of Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Suitability Ratio*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dewasa ini berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah yang semakin besar dan kritis terutama semenjak reformasi. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan

dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah ke masyarakat. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002, p.121).

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai :

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Kontribusi masing-masing pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Akuntansi

Berikut disebutkan beberapa definisi tentang akuntansi, menurut *Accounting Principles Board* (1970) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dimana fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan menurut *American Accounting Association* (1966) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:43) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat 1, tentang pedoman

pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu "suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi".

Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengemukakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (2007:18) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Bastian (2010:6) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:14) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dan informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Anggaran Sektor Publik

Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2002:62) adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumarjo (2012:88) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Syamsi (2013:199) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Halim (2013:231) Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian (Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2014:262).
2. Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:325).
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah

daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya yang dikemukakan (Halim, 2013:234).

4. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja Total Realisasi Belanja Daerah dan Total Realisasi Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dana besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

METODE

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
2. Data-data untuk perhitungan analisis rasio yang berasal dari laporan realisasi anggaran Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur periode 2015-2016 sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Berau.
 - b. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Kutai Barat.
 - c. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Kutai Timur.
 - e. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Mahakam Ulu.
 - f. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Paser.
 - g. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - h. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kota Balikpapan.
 - i. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kota Samarinda.
 - j. Laporan Realisasi Anggaran periode 2015-2016 Kota Bontang.
3. Data yang dapat mendukung penelitian seperti literature, buku referensi, jurnal, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan penelusuran data sekunder (kepuustakaan dan manual). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri dan mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran periode 2015-2016 diperoleh dari Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Arikunto, 2012, p.158).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Menghitung Rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1: Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2011:250)

2. Menghitung Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Rasio Efektivitas dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011:101)

3. Menghitung Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja keuangan	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2013:234)

4. Menghitung Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan keserasian belanja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4 : Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Keserasian Belanja Daerah Otonom Kemampuan Keuangan	Rasio Keserasian Belanja
Tidak Serasi	0 – 20
Kurang Serasi	>20 - 40
Cukup Serasi	>40 - 60
Serasi	>60 - 80
Sangat Serasi	>80 - 100

Sumber : Halim (2012:268)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah ringkasan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang tahun anggaran 2015 dan 2016 :

Tabel 4.17

Ringkasan Semua Rasio di Kabupaten dan Kota Kalimantan Timur Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Tahun 2015				
	Rasio				
	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Keserasian	
Belanja Rutin				Belanja Pembangunan	
Berau	15,66%	129,31%	124,22%	52,48%	47,41%
Kutai Barat	4,16%	55,01%	104,03%	32,22%	67,78%
Kutai Kartanegara	11,40%	133,43%	126,69%	58,16%	41,76%
Kutai Timur	3,92%	129,15%	113,28%	61,13%	38,82%
Mahakam Ulu	1,39%	141,19%	118,44%	53,58%	46,41%
Paser	4,90%	102,61%	116,92%	63,08%	36,89%
Penajam Paser Utara	3,30%	56,54%	98,03%	66,05%	33,95%
Balikpapan	33,21%	101,54%	131,41%	62,27%	37,73%
Samarinda	16,07%	47,83%	113,43%	62,34%	37,64%
Bontang	11,40%	103,33%	123,43%	64,31%	35,56%

<i>Rata-Rata</i>	10,54%	100,00%	116,99%	57,56%	42,39%
------------------	--------	---------	---------	--------	--------

Sumber : Data diolah oleh penulis

Tabel 4.18
Ringkasan Semua Rasio di Kabupaten dan Kota Kalimantan Timur Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Tahun 2016				
	Rasio				
	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Keserasian	
Belanja Rutin				Belanja Pembangunan	
Berau	11,62%	105,00%	103,03%	61,79%	38,21%
Kutai Barat	4,70%	69,62%	88,22%	72,92%	26,92%
Kutai Kartanegara	6,92%	93,73%	87,58%	83,42%	16,55%
Kutai Timur	18,07%	109,98%	93,90%	61,61%	38,38%
Mahakam Ulu	1,69%	107,99%	81,34%	68,27%	31,73%
Paser	6,82%	114,45%	82,62%	78,53%	21,46%
Penajam Paser Utara	20,17%	107,24%	90,66%	66,33%	33,62%
Balikpapan	39,10%	100,79%	106,09%	73,27%	26,68%
Samarinda	19,13%	83,39%	95,66%	70,12%	29,84%
Bontang	16,46%	111,84%	95,96%	76,72%	21,45%
<i>Rata-Rata</i>	14,47%	100,40%	92,51%	71,30%	22,48%

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dari ke 4 (Empat) Analisis Rasio ini dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah di bagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan bahwa tinggi pula kemandirian suatu daerah. Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan dapat dilihat bahwa kemampuan daerah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang sangat kurang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini di sebabkan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, ini disebabkan proyeksi pencapaian PAD tidak tercapai secara opimal, antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut : proyeksi APBD terkendala serius dalam realisasi keuangan dan fisiknya, serta kontribusi distribusi dari Sembilan sektor usaha terhadap

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tampak sangat lesu. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur harus meningkatkan kemandirian daerah dengan cara meningkatkan PAD, agar dalam membiayai setiap kegiatan pemerintahan tidak tergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terus menerus. Contohnya dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan PAD.

2. Rasio Efektivitas suatu daerah bisa dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda di tahun 2015 dan 2016 sangat efektif, karena rasio ini mampu menyerap anggaran setiap tahunnya sehingga persentasenya lebih dari 100%, ini membuktikan baiknya perencanaan yang menjadi tolak ukur dalam merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah. Namun pada Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota tahun 2015 dan 2016 berada pada posisi tidak efektif yang berarti bahwa kemampuan Kabupaten dan Kota tersebut dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggungjawabnya tidak efektif karena kurang dari 100%.
3. Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya pemerolehan PAD dengan realisasi penerimaan PAD, semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja suatu daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Dari perhitungan rasio efisiensi tahun 2015 dapat diketahui bahwa Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara berada dikriteria kurang efisien. Sedangkan Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang berada dikriteria tidak efisien.
4. a. Rasio Keserasian Belanja Rutin tahun 2015 dapat diketahui bahwa Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu berada pada kriteria cukup serasi, sedangkan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang berada pada kriteria serasi. Kabupaten yang paling kurang serasi adalah kabupaten Kutai Barat. Untuk tahun 2016 hampir seluruh Kabupaten dan Kota berada pada kriteria serasi, hanya ada 1 kabupaten yang memiliki kriteria sangat serasi yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara.
b. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan tahun 2015 dapat diketahui bahwa Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu berada pada kriteria cukup serasi, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat berada pada kriteria serasi, sedangkan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang berada pada kriteria kurang serasi. Untuk belanja Pembangunan tahun 2016 dapat diketahui bahwa Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan Kota Samarinda, dan Kota Bontang berada pada

kriteria kurang serasi, sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria tidak serasi.

5. Berdasarkan wawancara dengan staff dibidang keuangan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ada beberapa faktor-faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan dengan hasil perhitungan Rasio Efektivitas yang kurang efektif dan hasil perhitungan Rasio Efisien yang tidak efisien yaitu (a) Kesadaran masyarakat alam membayar pajak dimana setiap Kabupaten/Kota dapat ditemukan berbagai fakta yang memperlihatkan adanya kecenderungan masyarakat wajib pajak untuk lalai atau tidak membayar pajak, (b) Lemahnya faktor ekonomi masyarakat, (c) Sistem pemungutan untuk retribusi daerah dikelola oleh masing-masing SKPD, misalnya: perizinan dikelola oleh BP3M, alat berat dikelola oleh PUBM, kolam renang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dsb., sehingga pengawasan terhadap taat atau tidaknya wajib pajak sangat bergantung dengan pengelolaan dari masing-masing SKPD tersebut. (d) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, secara umum PAD ini berasal dari deviden atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemampuan BUMD dalam mengelola perusahaan daerah/manajemen BUMD selama ini mengalami rugi sehingga kontribusinya kecil atau belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD dan banyaknya BUMD yang tidak beroperasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan rasio-rasio keuangan 7 Kabupaten dan 3 Kota yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Kemandirian keuangan 7 Kabupaten dan 3 Kota pada tahun 2015 memiliki rata-rata sebesar 10,54% dan tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 14,47% termasuk dalam katagori rendah sekali karena berada pada interval 0-25%. Hal ini terlihat pada 7 kabupaten dan 3 kota yang tingkat kemandiriannya rendah sekali, namun pemerintah daerah sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakatnya karena mempunyai sumber daya alam yang besar.
2. Tingkat Efektivitas 7 Kabupaten dan 3 Kota pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata sebesar 100,00% dan tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 100,40% yang berarti rasio efektivitas sangat efektif, karena berada pada interval diatas 100%. Hal ini telah menggambarkan kinerja 7 Kabupaten dan 3 Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015 dan 2016 termasuk baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.
3. Tingkat Efisiensi 7 Kabupaten dan 3 Kota pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata sebesar 116,99% tergolong tidak efisien karena berada pada interval 100%-keatas dan tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 92,51% tergolong kurang efisien karena berada pada interval 90%-100%.
4. Rata-rata tingkat keserasian belanja daerah untuk 7 Kabupaten dan 3 Kota tahun 2015 adalah Belanja Rutin sebesar 57,56% dan tahun 2016 sebesar 71,30% sedangkan Belanja Pembangunan tahun 2015 sebesar 42,39% dan tahun 2016 sebesar 28,48%. Jadi dapat disimpulkan Belanja Rutin lebih diprioritaskan dari pada Belanja Pembangunan.
5. Dari ke 4 (Empat) analisis rasio ini tidak dapat disimpulkan daerah mana yang menduduki peringkat terbaik, karena tiap-tiap daerah terhadap tiap-

tiap rasio tersebut tidak dapat menjamin ketika rasio satunya baik belum tentu pula di rasio-rasio lainnya mendapatkan hasil yang baik pula melainkan mendapatkan hasil yang sebaliknya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemandirian 7 Kabupaten dan 3 Kota, perlu lebih meningkatkan lagi kemampuannya dalam menggali sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan PAD. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap PAD. Intensifikasi PAD dapat dilakukan dengan memperbaiki aspek kelembagaan pengelola PAD yaitu Dinas Pendapatan Daerah, memperbaiki sistem dan tarif pemungutan, meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya, meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD, serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah. Ekstensifikasi PAD yaitu menggali sumber-sumber PAD yang baru namun tanpa memberatkan masyarakat.
2. Tingkat Efektivitas yang sudah efektif perlu dipertahankan, karena ini menggambarkan kinerja 7 Kabupaten dan 3 Kota yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.
3. Tingkat Efisiensi yang cukup efisien perlu ditingkatkan dengan cara memberikan alokasi lebih besar pada sektor-sektor yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
4. Pada Tingkat Keserasian, Rasio Belanja Pelayanan Publik yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan Pembangunan di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principle Board (APB). 1970. *Statement No. 4. Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise*. Amerika Serikat.
- American Accounting Association. 1966. *A Statement of Basic Accounting Theory*. Evanston Ill. United States America.
- Arikunto, S. 2012. *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Bastian, Indri. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang "Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah".
- Mahmudi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Edisi Kedua. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan 3. ANDI. Yogyakarta.
- Nugroho, Akram Arif. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali APBD Tahun 20018-2010. *Skripsi* : Muhammadiyah Surakarta.

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang "Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah".
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang "Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah".
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Skripsi* : Universitas Brawijaya Malang.
- Santoso, Oldison, Jantje J Tinangon, dan Inggriani Elim. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangine. *Jurnal Emba* : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Septiani, Nanda. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Provinsi Se Kalimantan. *Skripsi* : Universitas Mulawarman Samarinda.
- Sumarjo, Hendro. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi* : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syamsi, Ibnu. 2013. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Cetakan ke 4. Rineka Cipta. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2014. *Good Governance. Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia. Surabaya.